



PERBANDINGAN SISTEM HUKUM FEDERALISME DI AMERIKA SERIKAT DENGAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA



Buku ini menyajikan hal-hal fundamental berkaitan dengan sistem pemerintahan dengan fokus kajian federalisme di Amerika Serikat dan otonomi daerah di Indonesia. Dalam catatan sejarah, negara Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan federal, namun tidak lama setelah itu beralih ke negara kesatuan. Nampaknya, akhir-akhir ini penerapan desentralisasi sebagai konsekuensi negara kesatuan di Indonesia lebih bercorak federal.

Prinsip otonomi seluas-luasnya, ketidaktegasan dalam sistem otonomi daerah dengan ajaran rumah tangga materiil (*materiele huishoudingsleer*) dan riil (*riël huishoudingsbegrip*), serta desentralisasi asimetris yang diberikan kepada daerah adalah sebagian ciri negara federal. Meskipun secara de jure Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tidak menyebutkan Indonesia adalah negara federal, akan tetapi secara de facto prinsip-prinsip federalisme sudah melekat secara signifikan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menggunakan pendekatan perbandingan, sejarah hukum dan perundang-undangan, pembahasan dalam buku ini diuraikan dengan sangat lugas dan kontekstual. Buku ini dianjurkan untuk dibaca oleh para mahasiswa, akademisi serta peneliti, terutama mereka yang mempunyai fokus kajian dalam bidang hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pemerintahan daerah, perbandingan hukum, serta bidang kajian ilmu hukum secara umum.

ISBN 978-623-7161-01-2



9 786237 161912

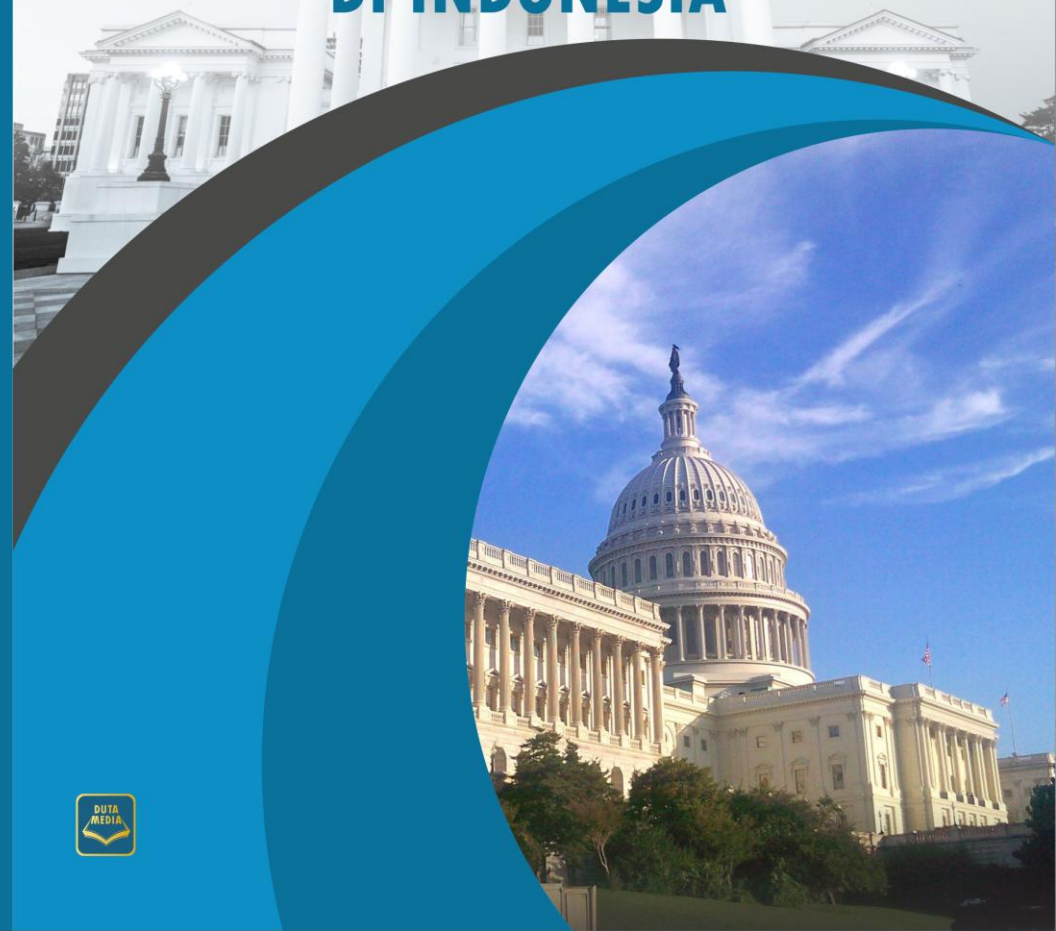
CV. DUTA MEDIA

 dutamedia.id
 redaksi.dutamedia@gmail.com
 0823 3306 1120
 @cv.dutamedia
 @penerbit.dutamedia
 Pamekasan Jawa Timur



Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.
Hesti Nuraini
Moch. Zaidan Alamsyafi
Ahmadin Yazid Risantiano

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM FEDERALISME DI AMERIKA SERIKAT DENGAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA



**PERBANDINGAN SISTEM HUKUM
FEDERALISME DI AMERIKA SERIKAT
DENGAN OTONOMI DAERAH DI
INDONESIA**

Riza Multazam Luthfy, S. H., M.H.

Hesti Nuraini

Moch. Zaidan Alamsyafi

Ahmadin Yazid Risantiano



PERBANDINGAN SISTEM HUKUM FEDERALISME DI AMERIKA SERIKAT DENGAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

© vi+50; 16x24 cm

Juli 2020

Penulis : Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H., Hesti Nuraini.
Moch. Zaidan Alamsyafi., Ahmadin Yazid Risantiano.

Editor : Achmad Safiudin R., M.H.

Layout &

Desain Cover : Duta Creative

Duta Media Publishing

Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur pamekasan, Call/WA:
082 333 061 120, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

All Rights Reserved.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk
apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-623-7161-91-2

IKAPI: 180/JTI/2017

**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

